

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

Pengawasan yang dalam bahasa Inggris berarti pengawasan dan kontrol, berasal dari kata bahasa Indonesia untuk "hati-hati", di antara para spesialis atau sarjana, pengawasan dianggap sinonim dengan pengawasan. Untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan searah dan mendapatkan kepuasan yang diinginkan, manajemen bisnis mengatur sejumlah ukuran untuk memantau kinerja standar, rencana, dan sasaran yang telah dikembangkan sebelum aktivitas dilakukan.

Untuk memastikan bahwa hasil dari pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan awal, George R. Terry merekomendasikan untuk membuat keputusan khusus sebelum kegiatan dimulai dan kemudian menerapkan prosedur perbaikan. Robbin mengklaim bahwa metode mendasar manajemen untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas adalah pengawasan. (Makmur, 2015)

Sondang P. Siagian (Makmur, 2015) memberikan kesimpulan bahwa pengawasan adalah tahapan atau sistem dari kegiatan yang mana sudah mengetahui efisiensi pelaksanaan kinerja organisasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dapat ditarik dari penjelasan bahwa pengawasan merupakan kegiatan untuk melihat secara langsung dan menyeluruh suatu rangkaian kegiatan dalam organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua rangkaian aktivitas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah perlu mengawasi dari badan publik sebelumnya telah direncanakan, dan disusun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, dan ini dimaksudkan untuk (Zaenal Mukarom, 2015):

- 1) Menentukan apakah aktivitas pekerjaan itu mulus
- 2) mengurangi kesalahan staf dan mencegah masalah untuk menghindarinya terjadi lagi
- 3) Melihat dan memantau operasional pekerjaan teknis untuk melihat apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang jujur dan transparan kepada masyarakat, pengawasan bertujuan untuk mewajibkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan tersebut berupa pengawasan kontrol publik yang sehat, objektif, dan bertanggung jawab.(zaenal mukarom, 2015)

Berdasarkan berbagai kajian, tujuan utama supervisi adalah membandingkan antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah ditetapkan, serta efisiensi dan efektivitas kerja, serta menentukan apakah ada hambatan atau kekurangan. Jika ada, maka solusi harus ditemukan.

Pada dasarnya ada beberapa jenis dari pengawasan yang dapat dilakukan. Adapun bentuk dari pelaksanaan pengawasan tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu (Zaenal Mukarom, 2015):

- 1) Pengawasan Langsung dan Pengawasan secara Tidak Langsung

Dalam pengawasan secara langsung dilakukan individu yang memberikan laporan ini berisi data yang dikumpulkan melalui survei atau pengamatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas manajemen puncak. Atau, menulis laporan adalah bentuk lain dari pengawasan tidak langsung. Bentuk alternatif terakhir dari pengawasan tidak langsung adalah mengawasi laporan yang ditulis dan/atau diamati secara langsung..

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif yaitu aktivitas yang dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang tidak lah perlu. Represif adalah kegiatan pemantauan yang sudah dilakukan seperti, evaluasi, audit dll.

3) Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Kegiatan yang dilakukan pejabat dari suatu negara dengan organisasi yang bersangkutan. Pemantauan eksternal adalah kegiatan di luar organisasi berupa saran dan kritik dengan tujuan agar hal-hal dapat diperbaiki.

Adapun tahap pengawasan yang dikemukakan oleh Donelly (zaenal mukarom, 2015) membagi tahap pengawasan tersebut menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. *Preminary Control* memiliki peran pada setiap proposal anggaran dalam hal harga layanan, keluaran dan hasil untuk setiap layanan.
- b. *Interim Control* menjamin bahwa pelayanan publik diberikan dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. *Post Control* pastikan layanan yang sesuai untuk membandingkan hasil evaluasi dengan tujuan awal.

Pengawasan ialah kegiatan yang sistematis yang telah dipersiapkan dan tertata dengan baik karena adanya penetapan standar. Menurut Handoko Adapun indikator pengawasan yang biasanya paling sedikit itu ada lima, yaitu:

1) Penetapan Standar

Penetapan standar pelaksanaan sebagai suatu “titik tumpu” bertujuan mendapat hasil yang digunakan sebagai standar. Penetapan standar yang telah ditetapkan dan menjadi acuan untuk seluruh aktivitas dari BPOM RI baik pusat maupun Daerah. Dalam keppa BPOM RI Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 tahun 2020 tentang penetapan indikator kinerja yang berisikan penetapan standar BPOM, yaitu:

- a. Tercapainya Obat dan Makanan yang baik, aman serta bermutu.
- b. Tercapainya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang baik, aman dan berkhasiat.
- c. Tercapainya makanan yang baik, serta memberi manfaat bagi tubuh.
- d. Memperketat dan mempertegas hukum bagi pelaku nakal dalam edaran obat dan makanan.

Adapun yang karakteristik dari penetapan standar agar tujuan tepat sasaran terbagi menjadi dua, yaitu:

a. SOP (*Standar Operational Procedur*)

SOP (*Standar Operational Procedur*) adalah peraturan, tata cara, langkah, serta panduan dalam semua kegiatan operasional yang dilakukan di sebuah instansi dan perusahaan yang mana agar segala sesuatu yang direncanakan berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Dengan

dibuatnya SOP diharapkan tidak adanya kesalahan atau minim dari kesalahan yang akan ada nantinya. Inti dari SOP ialah panduan dalam pelaksanaan bagi seluruh SDM yang bekerja atau terlibat dalam sebuah instansi maupun perusahaan (Budihardjo, 2014).

SOP yang menjadi acuan dari seluruh karyawan BPOM RI baik itu dari pusat ataupun daerah yang tidak bisa terlewatkan, sebelum obat dan makanan beredar ke masyarakat ialah:

- 1) Memastikan bahwa Produk tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan akuntabilitas saat pangan dan obat-obatan didistribusikan ke masyarakat umum.
- 2) Melakukan pemeriksaan pada obat dan makanan sebelum didaftarkan ke pusat sampai sertifikasi.

b. QMS (*Quality Management System*)

QMS adalah yang membuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan demi meningkatkan dan mengontrol segala bentuk proses yang akan dilakukan pada suatu instansi atau perusahaan sehingga memberikan peningkatan kinerja yang mana bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada instansi atau perusahaan tersebut (Firdaus et al., 2021).

QMS pada BPOM mengacu pada ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 merupakan sertifikat yang menjadi standar berkelas internasional di bidang sistem manajemen mutu. Tujuan dari sertifikasi ini adalah menjamin Produk atau jasa yang dihasilkan dari suatu instansi ataupun dari suatu perusahaan

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu, ISO. Dengan sertifikasi ISO sebuah instansi atau perusahaan bertanggung jawab penuh dengan kualitas dari Produk yang dihasilkan (Roheti & Kuncorosidi, 2020).

2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Menetapkan ukuran pengawasan sedemikian rupa sehingga terarah dan tercapai pengawasan yang tepat. Untuk melindungi masyarakat terhadap barang yang tidak sesuai spesifikasi, menjamin konsistensi pasca pemasaran Produk, dan mengidentifikasi Produk palsu, illegal, dan legal sejak dini, Produk harus diawasi sebelum dipasarkan. Pengawasan dilakukan dengan dua cara yaitu post market dan pre market. (Profil BPOM, 2019).

a. *Post Market*

Post market adalah pengawasan yang dilakukan setelah Produk beredar di masyarakat luas untuk melihat konsistensi mutu dari Produk yang beredar, keamanan serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Adapun tindakan yang dapat dilakukan pada pengawasan *post market* ialah:

a) Inspeksi sarana produksi obat dan makanan

Pengawasan yang dilakukan dalam inspeksi sarana produksi obat dan makanan dilakukan pada distributor yang ada di setiap daerah. Memastikan setiap produksi terjamin ke higienisannya.

b) Pengawasan mutu Produk yang beredar

Pengawasan mutu Produk yang beredar yang dilakukan adalah mengecek mutu Produk yang telah tersebar, apakah masih ada

ditemukan yang tidak memiliki mutu yang bagus. Pengecekan dilakukan di pasar atau supermarket.

c) Pengawasan aspek keamanan obat dan makanan

Pada pengawasan ini fokus pada pengecekan dari obat dan makanan yang beredar, memastikan Produk aman dan tidak ada keluhan dari masyarakat.

d) Pengawasan terhadap penandaan, lebel Produk obat dan makanan

Memastikan bahwa Produk yang beredar sudah memiliki label resmi BPOM, serta terdaftar saat mrngecek di portal resmi BPOM.

b. *Pre Market*

Pre market atau biasa disebut dengan Setiap tahun dilakukan pengambilan sampel rutin, sampel deteksi dini, dan sampel khusus untuk makanan, vitamin, serta obat tradisional dan kosmetik

3) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata

Dalam menentukan tindakan yang termasuk dalam pengawasan, pengukuran pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan sebagai kegiatan yang terus menerus dan berulang. Hal ini dilakukan dengan setiap evaluasi. Pada saat melakukan tugas pengukuran selama implementasi, bahkan secara mingguan atau triwulanan (setiap tiga bulan). Berdasarkan analisis risiko dan skala prioritas dari kajian pemeriksaan terakhir, fasilitas yang akan diperiksa dipilih (BPOM, 2018).

Analisa resiko adalah analisa yang diidentifikasi dalam penilaian resiko. Mengidentifikasi resiko apa yang akan terjadi dan dapatkah terancam bagi sarana yang akan diperiksa. Menentukan koefisien dampak dan resiko yang akan didapati untuk sarana yang akan diperiksa nanti kedepannya serta untuk masyarakat. Skala prioritas adalah pengukuran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan tingkat kepentingan dari kebutuhan yang ada, agar bisa menentukan pengukuran mana yang harus dilakukan sesuai dengan urutan kepentingan yang ada (Ferdiansyah, 2016).

4) Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Penganalisan Penyimpangan

Tindakan dalam perbandingan sangat penting untuk menentukan hasilnya konsisten pada standar yang sebelumnya sudah ditetapkan atau pelaksanaan yang direncanakan. Setiap Daerah memiliki cara tertentu dalam melakukan pengawasan, namun sudah ada target sasaran mutunya.

Membandingkan implementasi aktual dengan implementasi yang direncanakan atau standar yang telah ditentukan merupakan langkah penting dalam proses pengawasan. Dalam situasi ini, ini juga merupakan langkah termudah untuk diselesaikan, meskipun menganalisis varian mungkin menantang.

5) Pengambilan Tindakan Koreksi

Tindakan korektif harus terus dilakukan untuk mendukung kinerja dan hasil guna menilai pencapaian kinerja dan menghasilkan laporan lapkin. Untuk keperluan evaluasi, harus diadakan evaluasi bulanan berupa laporan dan rapat evaluasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, standar pengawasan, dan sasaran keberhasilan. Dalam kegiatan evaluasi memerlukan pelaksanaan akuntabilitas

mengenai standar pelaksanaan dan melakukan kewajiban dari setiap karyawan atau individu dalam organisasi untuk dipercaya dalam mengolah sumber daya yang ada yang menyangkut pertanggung jawaban kontrol (Iqbal Fadhlurrohman et al., 2021).

Jika temuan analisis menunjukkan bahwa tindakan korektif diperlukan, itu harus diambil. Tindakan korektif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk mengubah standar saat ini, meningkatkan implementasi, atau melakukan keduanya sekaligus.

Adapun beberapa karakteristik dari pengawasan yang meliputi, sebagai berikut (Ulya et al., 2019):

Tabel 2. 1 Karakteristik Pengawasan

No.	Karakteristik Pengawasan	
1	Tepat	Data harus akurat dan konsisten dengan fakta yang relevan untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan.
2	Sesuai dengan waktu yang ditentukan	Pemantauan tepat sehingga dilakukan pemeriksaan dan koreksi secepat mungkin.
3	Detail dan Adil	Sepanjang untuk menghindari duplikasi yang merugikan struktur pengawasan, itu harus adil dan detail.
4	Fokus pada strategi	Dalam hal ini, masalah prioritas yang perlu ditangani segera untuk mencegah kerugian yang signifikan.
5	Praktis secara finansial	Anggaran untuk Tindakan implementasi harus, setelah disesuaikan dengan kerugian, setidaknya sesuai dengan modal yang diinvestasikan.
6	Organisasi praktis	Prosedur kontrol harus berjalan dengan data dan kebenaran organisasi.
7	Koordinasikan dengan alur kerja organisasi	Untuk mneghindari moskomunikasi diantara karyawan disemua tingkatan organisasi, komunikasi harus terbuka dan harus ada Kerjasama.
8	Fleksibel	Kegiatan pengawasan harus mencakup berbagai aspek agar kinerja organisasi senantiasa terjaga.
9	Praktis dan berfungsi	Satu set referensi universal harus digunakan

	sebagai panduan	untuk kontrol sebagai penghalang terhadap kegagalan.
10	Dapat diterima dalam organisasi	Untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat menerima pelaksanaan kegiatan, pengendalian organisasi harus mengatasi berbagai faktor.

2.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Pengawasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan menurut (Mulyadi, 2013) dan mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Adapun menurut Abdurrahman (syafiie, 2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan, antara lain :

1. Kebijakan Diterapkan

Kebijakan adalah berbagai rangkaian dari tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok, atau pemerintah dimana terdapat hambatan. Kebijakan memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok orang guna untuk memecahkan dan menemukan titik tengah dari suatu masalah yang ada (SUSANTI, 2020).

Dalam sebuah organisasi berbagai macam dampak dari perubahan lingkungan sering terjadi serta adanya peraturan dan kebijakan baru dari

pemerintah dan lain sebagainya yang mana sangat berpengaruh terhadap berjalannya kebijakan yang ada.

2. Mendukung Anggaran Pembiayaan

Anggaran adalah rencana yang telah disusun secara rinci dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu kedepannya. Dengan adanya dukungan anggaran pembiayaan maka tingkat keberhasilan dari usaha-usaha organisasi akan lebih besar yang mana dibantu dengan kebijaksanaan dan perencanaan yang terarah (Paramitha et al., 2018).

Dalam mendukung anggaran pembiayaan yang diperlukan maka harus adanya persetujuan dari pihak terkait dan ada kesepakatan dari kedua belah pihak agar anggaran yang dikeluarkan terarah dan tepat sasaran.

3. Penempatan Karyawan dan Prosedur Kerja

Penempatan karyawan dilakukan dalam organisasi oleh pihak yang berwenang guna melancarkan segala bentuk tugas yang akan dilakukan dan penempatan karyawan ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau skillnya. Dalam penempatan karyawan mempunyai tujuan agar karyawan yang ditempatkan sesuai dengan minat serta kemampuannya sehingga karyawan tersebut produktif.

Dengan penempatan karyawan yang tepat dan sesuai dengan latar belakang, minat, serta kemampuannya maka akan mempermudah dalam prosedur kerja, karna para karyawan yang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meminimalisir kesalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut maka kepemimpinan memerlukan *green thinking*, keyakinan terhadap agama seseorang, karena setiap tindakan dihargai dan dianggap setiap pekerjaan selalu diperhatikan. Kerjakan semua pekerjaan, tetapkan pedoman dan jangan melanggar prinsip yang ada, alokasikan dana atau anggaran untuk percepatan setiap kegiatan dan pastikan perlunya dilakukan pemantauan, agar tidak mengganggu pemantauan. Menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan mereka dan di mana mereka dibutuhkan

2.3 Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan obat makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Obat dan Makanan. Pada tahap dilakukan pengawasan berdasarkan Produksi obat dan makan melewati serangkaian pemeriksaan di laboratorium ditemukan hasil produksi aman untuk dikonsumsi, dan terjalin kerjasama antar otoritas untuk memperlancar pelaksanaan pencapaian (BPOM, 2018)

- 1) Pengawasan dari BPOM membuat perencanaan dan titik tumpu dari kualitas Produk, evaluasi obat dan makanan terdaftar dan penerbitan Nomor Izin Edar (NIE), pelabelan, diambilnya sampel dan di uji. Produk Sarana, penertiban Produk palsu dan ilegal palsu yang merugikan konsumen.
- 2) Pemantauan eksternal harus dilakukan, yakni. tujuannya adalah untuk mengevaluasi kelayakan Produk yang akan diproduksi agar dapat segera dilakukan perbaikan jika terdapat beberapa keluhan dan saran mengenai

penggunaan Produk tersebut. Prinsip dasar dari sistem pengawasan obat dan makanan antara lain:

- a. Tindakan keamanan cepat, akurat, tepat dan profesional.
- b. Tindakan diambil berdasarkan atas tingkat hubungan dan berbasis bukti ilmiah.
- c. Lingkup kontrol bersifat kompherensif dan mencakup siklus proses.
- d. Berskala nasional/antar provinsi, dengan jaringan lintas internasional.
- e. Jaringan laboratorium nasional yang berdaya saing dan kuat berkerjasama dengan jaringan global.
- f. Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu Produk.

2.4 Makanan

Makanan sangat diperlukan oleh semua orang karena makanan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. fungsi dari sebuah makanan yaitu untuk tumbuh kembang dan memperharui jaringan tuuh yang rusak juga berperan dalam kekebalan imun tubuh terhadap berbagai penyakit dari virus dan bakteri (Notoatmodjo, 2003).

Jika tidak adanya makanan dan minuman maka seluruh manusia tidak akan dapat untuk melangsungkan hidupnya. Menurut WHO (World Health Organization) yaitu semua substansi yang diperlukanh oleh tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan (Putra Prabu, 2016).

Seluruh jenis makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya:

- 1) Makanan dalam kondisi matang yang sempurna.
- 2) Makanan bebas dari pencemaran disetiap produksi.
- 3) Makanan bebas dari perubahan fisik, bahan kimia berbahaya.
- 4) Makanan bebas dari mikroorganisme dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit.

Penyakit yang ditimbulkan dapat digolongkan menjadi dua yaitu infeksi dan intoksikasi. Istilah dari infeksi dapat digunakan jika setelah mengkonsumsi pangan atau minuman yang mengandung bakteri pathogen, timbul gejala penyakit. Intoksikasi adalah keracunan yang ditimbulkan karena mengkonsumsi pangan yang mengandung senyawa racun (Baliwati et al., 2004).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Wijaya, 2016), Jurnal Ilmu Administrasi Negara,	Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Kepulauan Riau terhadap penetapan Standar mutu Produk air minum dalam kemasan	Metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data purposive	Hasil penelitian Pengawasan mutu Produk air minum dalam kemasan (AMDK) yang terdaftar di BPOM Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang yaitu. standarisasi alat ukur, ditentukan pada tahap awal dari hasil penelitian yaitu pengawasan air

		(AMDK) di Tanjung Pinang	sampling.	minum dalam kemasan. Badan Penyelenggara Pangan (AMDK) dalam pemecahan masalah untuk mengontrol masuknya praktik Produksi pangan olahan oleh industri pangan. Langkah selanjutnya menggunakan data untuk mengukur permasalahan di lapangan, dan temuan menunjukkan bahwa masih ada penilaian yang tidak mencerminkan kenyataan di sana.
2	(Ernawaty & Mardiah, 2014), Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (JOM UNRI)	Pelaksanaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) memantau Produk impor makanan dan Obat (BBPOM)	Metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data purposive sampling.	Hasil penelitian Balai Besar Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap pelaksanaan pengawasan Produk dan makanan impor berdasarkan indikator seperti standar pangan, evaluasi dan tindakan perbaikan masuk dalam kategori Cukup Baik, karena masih banyak jenisnya. Bahan pangan impor ilegal yang ditemukan di swalayan yang tidak memiliki label dari BPOM dan memiliki komposisi yang tidak layak untuk dikonsumsi.
3	(Haris Abdul, 2016), Jurnal Administrasi Publik	Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Berdagai	Metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpul	Hasil penelitian tentang pengoperasian sistem pengendalian yang dilakukan baik dalam penyelidikan maupun pemeriksaan sangat baik, jumlah dan keakuratan informasi yang dilaporkan oleh Biro

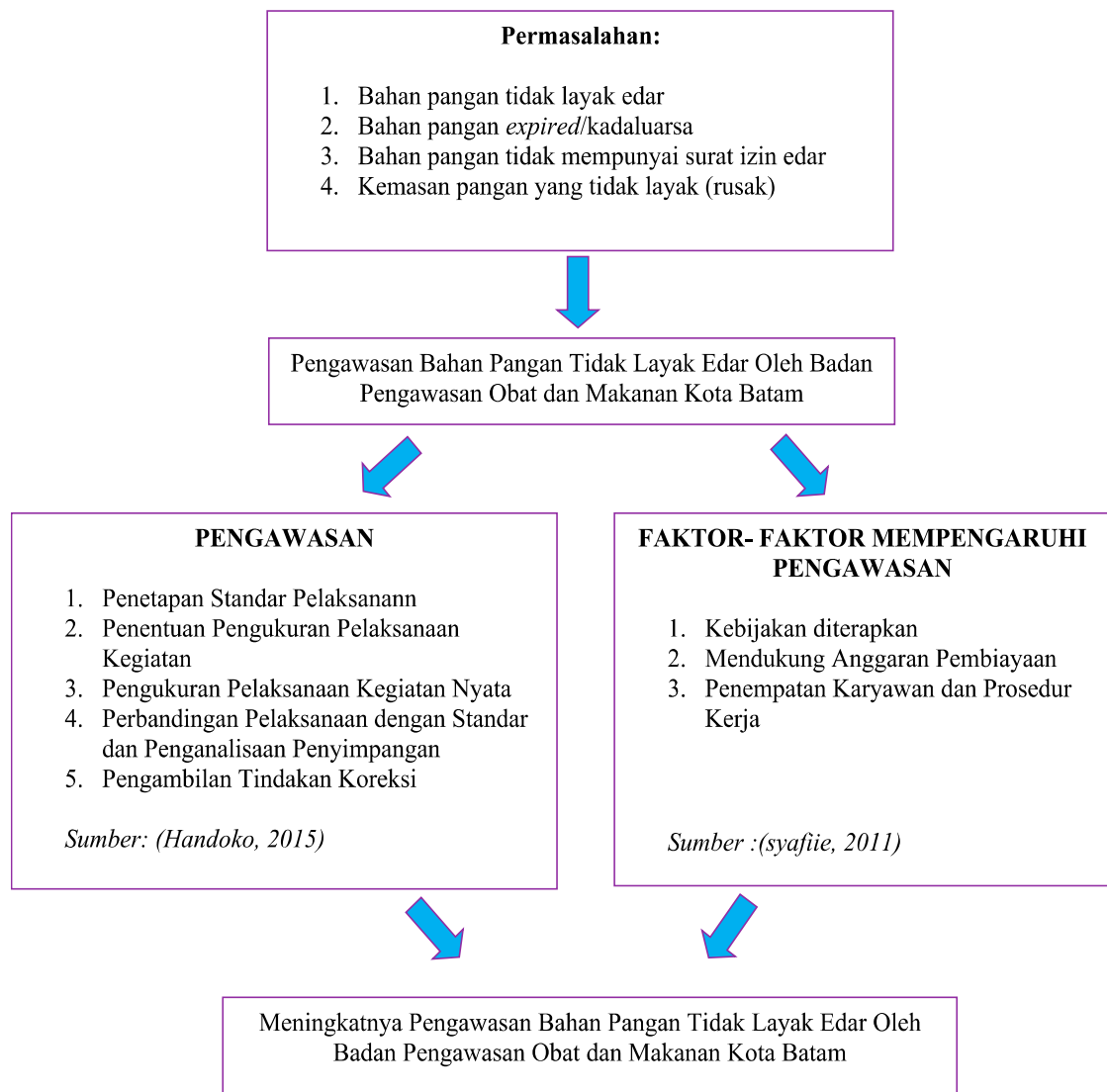
			an data purpiseve sampling.	Inspeksi Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan informasi dan fakta di lapangan. Kurangnya tenaga dan infrastruktur, sehingga fasilitas pemeriksaan Serdang Bedaga tidak dapat melakukan pemeriksaan secara maksimal.
4	(Ferry Angriawan, 2019), <i>Journal of Government and Civil Society</i>	Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan oleh Pedagang UMKM di Kota Pekanbaru	Penelitian ini merupakan metode kualitatif. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data purpiseve sampling.	Para pedagang UMKM di Kota Pekanbaru terus menemukan hasil investigasi pangan impor ilegal secara luas, sehingga BPOM harus memberikan sanksi tegas terhadapnya demi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kenyamanan bagi konsumen. Penyebabnya adalah minimnya jumlah pegawai dan minimnya infrastruktur penunjang operasional dan pemimpin yang efisien di kota Pekanbaru.
5	(FEBI FEBIOLA, 2017), <i>Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (JOM UNRI)</i>	Pengawasan Peredaran Produk makanan dan minuman impor di Bawah pengawasan ketat di Kota Pekanbaru	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer dan sekunder.	Hasil kajian pemantauan pergerakan impor makanan dan minuman di kota Pekanbaru menyimpulkan bahwa penertiban belum berjalan maksimal, dan belum optimalnya penertiban BPOM dan DISPERINDAG di kota Pekanbaru berkontribusi masih menjadi hal yang penting. banyak beredar Produk Minuman yang tidak terjamin keamanannya di Kota

				<p>Pekanbaru, serta pengetahuan konsumen tentang bahan habis pakai yang masih kurang, sedangkan faktor yang mempengaruhi pengawasan BPOM dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah kurangnya fasilitas. dan infrastruktur, termasuk kurangnya kendaraan operasional, mengakibatkan tidak efektifnya pemeriksaan dan penyuluhan distribusi minuman impor yang masih banyak tersedia di masyarakat..</p>
6	<p>(FITRI, 2019), Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JOM UNRI)</p>	<p>Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru</p>	<p>Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data purposive sampling.</p>	<p>Hasil penelitian Balai POM Kota Pekanbaru yang sengaja mengedarkan dan menjual kosmetik ilegal tersebut masih belum efektif. Jumlah tenaga kerja di bidang pemeriksaan dinilai tidak cukup untuk melaksanakan seluruh pemeriksaan, sehingga Balai POM perlu menambah jumlah tenaga kerja untuk memperkuat pengawasan. Balai juga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menjangkau situs-situs Komunikasi dan Informasi.</p>

7	(Ayu Mulyani Noor, 2015), jurnal <i>Online</i> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JOM UNRI)	Pengawasan Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru	Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Sumber data primer dan data sekunder.	Karena tidak meratanya sebaran temuan kajian tentang pelaksanaan pemeriksaan barang kaleng BBPOM di Kota Pekanbaru, maka makanan dan minuman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan. Pengawasan BBPOM Kota Pekanbaru masih memiliki keterbatasan staf dalam kewajiban pemantauan sarana dan prasarana Kota Pekanbaru, dengan BBPOM jarang mensosialisasikan maksud dan tujuan pemeriksaan dan menganggap kontraktor untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut sudah mengetahuinya. Penertiban BBPOM terhadap lalu lintas makanan (kalengan) ilegal di kota Pekanbaru dikompromikan oleh staf dan peralatan operasional, serta keterlibatan masyarakat yang masih rendah sehingga pengendalian kurang optimal.
8	(Timbul Dompok, 2018) Jurnal Niara	Analisis efektivitas kebijakan dan program badan pengendalian dampak lingkungan daerah (Bapedalda) Kota Batam	Metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer dan data sekunder.	Efektivitas AMDAL di Kota Batam untuk kawasan industri besar seperti Batam, Kabil, Panbil efektif dalam melakukan AMDAL. Hanya di Daerah pesisir belum tertangkap, karena kesadaran dan kekasaran para pemimpin bisnis masih ada.

		terhadap peningkatan persentase pelaksanaan Amdal		
9	(Aisyah et al., 2019), <i>Journal of Drug and Alcohol Research</i> Vol 8 2019	<i>The policy and Suprevision by Government of circulation Alcoholic Baverage in East Java, Indonesia</i>	Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Sumber data prime dan data sekunder. Teknik pengumpulan data purpiseve sampling.	Hasil Survei Penyalahgunaan Provinsi Jawa Timur memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol. Pengendalian dan pemantauan keuangan dan distribusi minuman ini dilakukan melalui pengumuman kenaikan harga dan peredaran. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan izin perdagangan dan penjualan minuman beralkohol, pemilik SIUP-MB dikenakan sanksi administratif dan setiap orang yang melakukan kegiatan penjualan dan penjualan dikenakan sanksi pidana paling sedikit 6 (enam) tahun. .) bulan dan denda maksimum. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir